

STRATEGI PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK

DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR

INDAH YULIYANTI

Nomor Stambuk : 105610 4735 13



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

STRATEGI PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

INDAH YULIYANTI

Nomor Stambuk : 105610 4735 13

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemberdayaan Penyandang
Disabilitas Fisik Dalam Pengelolaan Sampah
Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Indah Yuliyanti

Nomor Stambul : 105610 4735 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar


Ir. H. Saleh Mollah, MM

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima Oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1204/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Senin tanggal 28 bulan Agustus tahun 2017.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Indah Yuliyanti

Nomor Stambuk : 10561 04735 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 Juni 2017

Yang Menyatakan,



Indah Yuliyanti

ABSTRAK

INDAH YULIYANTI, 2017. Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar (dibimbing oleh Jaelan Usman dan Nuryanti Mustari)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mencoba untuk menjelaskan strategi pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas fisik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar serta faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi.

Hasil penelitian strategi pemberdayaan penyandang disabilitas dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar menunjukkan dari empat indikator yaitu (1) keterampilan yang dilakukan dengan cara pemberian pelatihan/pembinaan keterampilan dan melakukan penerapan keterampilan, (2) pengetahuan untuk lebih membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih mandiri dan proaktif dalam masyarakat, (3) kekuasaan dengan memberikan wewenang kepada para penyandang disabilitas dalam melakukan segala sesuatu yang dapat membantu dan membuat mereka hidup menjadi lebih baik dan lebih layak dalam lingkungan masyarakat, (4) koordinasi yang dilakukan dengan pihak atau instansi lain. Ditemukan bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam pemberian keterampilan masih kurang efektif mendorong penyandang disabilitas untuk lebih berdaya karena hanya sebagian dari mereka yang mampu mengubah pola pikir, hidup lebih mandiri dan mengembangkan hasil dari pelatihan keterampilan. Pemerintah perlu melakukan terobosan baru dalam memberdayakan penyandang disabilitas agar kehidupan mereka bisa lebih layak dan dapat diterima secara normal di lingkungan masyarakat. Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah lebih berperan dalam mempromosikan hasil kreativitas penyandang disabilitas dengan lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan mereka sehingga mampu lebih berdaya dan mencapai kemandirian. Selain itu pemerintah juga masih perlu untuk meningkatkan koordinasi terhadap pihak atau instansi lain dalam melakukan pemberdayaan. Karena masih banyak pihak yang juga memiliki tanggungjawab dalam memberdayakan penyandang disabilitas.

Keyword : Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas Fisik, Pengelolaan Sampah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar”** dapat di selesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku pembimbing II, yang selalu tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA dan Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si. selaku Sekretaris dan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Pihak Dinas Sosial Kota Makassar, UPTD Pengelolaan Sampah Kota Makassar, serta Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Makassar.
6. Saudara Seikatan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kakanda Nurkhaerah, S.Ip, M.Si dan sahabat-sahabat penulis Yusmaniar, Herianti, Wahida Ardintiana, Rizkyani Kamaruddin, Lis Jumarni, Clara Dheby, Triyana, Riswan Jufri dan Arjuna Putra yang selalu ada menemani, membantu, dan memberi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesuksesan menyertai perjalanan kita semua.

Ucapan terimakasih yang teristimewa dan terdalam penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H.Rowa dan Ibunda Hj.Murni, karena semua usaha penulis tidak berarti apa-apa tanpa adanya pengorbanan dan dorongan semangat yang sangat luar biasa dari beliau yang selalu rela melakukan segala hal, memberikan doa yang tulus, motivasi, nasehat serta membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terimakasih juga untuk saudara sedarah penulis

yang selalu menyayangi dan memberi semangat untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah Khasanah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatu

Makassar, 14 Juni 2017

Penulis

INDAH YULIYANTI



DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Strategi Pemberdayaan	10
1. Pengertian Strategi	10
2. Proses Strategi	11
3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	13
4. Tujuan pemberdayaan	19
5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	22
B. Penyandang Disabilitas Fisik	24
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	24
2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas	29
3. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	31
C. Koordinasi	34
D. Konsep Bank Sampah	36
E. Kerangka Fikir	38
F. Fokus	40

G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	40
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
B. Jenis dan Tipe Penelitian	42
C. Sumber Data.....	43
D. Informan Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Pengabsahan Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	48
B. Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar.....	56
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Makassar	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat.....	19
Tabel 3.1 Jumlah Informan	44
Tabel 4.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Makassar	55
Tabel 4.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Dalam Pengelolaan Sampah	63
Tabel 4.3 Bantuan fasilitas praktek keterampilan bagi penyandang disabilitas tahun anggaran 2015	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disabilitas menjadi salah satu masalah yang seringkali dipandang sebelah mata. Kata disabilitas adalah sebuah istilah yang sekarang digunakan sebagai pengganti dari kata penyandang cacat atau difabel. Mungkin sebagian masyarakat masih kurang paham dengan kata tersebut karena lebih sering menyebutnya sebagai penyandang cacat, namun untuk memperhalus dan lebih menghargai orang-orang yang menyandang cacat tersebut maka kata disabilitaslah yang sekarang digunakan, yang dimana telah diatur didalam Undang-Undang. Disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki keterbatasan kemampuan. Baik dari segi fisik, mental, intelektual, sensorik, maupun perkembangannya. Kondisi seperti ini bisa saja terjadi atau menyerang seseorang sejak lahir maupun pada pertengahan perjalanan hidupnya.

Sebagian besar masyarakat yang memiliki kondisi keterbatasan kemampuan tersebut merasa putus asa dengan hidupnya karena begitu banyak permasalahan hidup yang harus mereka hadapi. Tidak hanya pada permasalahan dalam tubuhnya, tetapi kondisi sosialpun memaksa mereka untuk selalu kuat dan sabar menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka selalu termarginalkan dalam lingkungan masyarakat, karena kuantitas masyarakat beranggapan bahwa orang-orang penyandang disabilitas dengan kondisi keterbatasannya itu adalah mereka yang tidak berguna, tidak mampu berbuat apa-apa dan hanya sebagai aib atau masalah dalam keluarganya maupun di lingkungan sosialnya.

Penyandang disabilitas juga manusia yang sama dengan manusia yang lain. Mereka bukan aib, mereka juga bukan masalah dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya, melainkan para penyandang disabilitas adalah orang-orang yang harus kita perhatikan karena mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang non disabilitas atau orang yang normal. Dalam penelitiannya, (Hendra Wijayanto, 2015) dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, mengatakan bahwa penyandang cacat atau yang sekarang dikenal dengan disabilitas itu memiliki hak yang sama, kewajiban dan peran yang sama dengan warga Negara lainnya, serta kesempatan untuk mendapatkan kesetaraan. Para penyandang disabilitas tersebut adalah mereka yang seharusnya kita berdayakan, perhatikan dan memberikannya semangat agar mereka mampu melawan keterbatasannya itu dan menggantinya dengan motivasi untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi.

Penyandang disabilitas selalu dipandang sebelah mata, bahkan yang telah eks menderitapun masih saja termarjinalkan. Salah satu contohnya adalah masyarakat eks penderita kusta, berbagai stigma negatif tertuju kepada mereka. Masyarakat masih saja mengaggap eks penderita kusta sebagai kaum dengan identitas cacat, menjijikan, dan menular. Posisi eks penderita kusta yang minoritas dan termarjinalkan dari kuatnya pengaruh masyarakat membuatnya berada dalam titik balik untuk melawan lingkungan sosialnya agar mereka mampu lebih mandiri dan membuktikan bahwa mereka sama seperti masyarakat secara umumnya. Mereka juga mampu melakukan hal-hal yang orang normal lakukan. Mereka memiliki keterampilan-keterampilan yang hebat, pengetahuan yang layak, dan

kekuasaan untuk memenuhi hak-hak kehidupan mereka. Namun mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah, tidak mendapatkan wadah untuk mereka mampu mengembangkan keterampilannya.

Penyandang disabilitas fisik selalu mengalami diskriminasi dimanapun mereka berada. Oleh karena itu mental mereka harus lebih kuat dari masyarakat pada umumnya untuk menghadapi kehidupan sosialnya yang begitu minoritas dalam masyarakat. Mereka masih sangat kurang mendapatkan sentuhan dari masyarakat, padahal para penyandang disabilitas fisik adalah mereka yang perlu kita perhatikan dengan baik dan perlakukan secara khusus karena keterbatasan mereka. Penyandang disabilitas fisik memerlukan bantuan dari masyarakat untuk kesejahteraan hidup mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas adalah orang yang mesti kita berdayakan dengan cara pemenuhan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas dan harus disetarakan antara penyandang disabilitas dengan nondisabilitas, baik untuk kehidupan sehari-harinya maupun dalam bidang pekerjaan. Perhatikan bunyi UUD 1945 pasal 27 ayat 1, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

ada kecualinya. Ayat 2, Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dua ayat tersebut secara tegas dan jelas memperlihatkan bahwa semua warga negara baik yang normal dan disabilitas memiliki peluang yang setara dalam memperoleh pekerjaan.

Menurut (Siswadi, 2011) Ketua Umum Penyandang Cacat Indonesia, jumlah penyandang cacat di Indonesia berdasarkan data Depkes RI mencapai 3,11% dari populasi penduduk atau sekitar 6,7 juta jiwa, sementara bila mengacu pada standar yang diterapkan Organisasi Kesehatan Dunia PBB dengan persyaratan lebih ketat, jumlah penyandang disabilitas Indonesia mencapai 10 juta jiwa (*tribunnews.com, 11 Maret 2014*). Kemudian Provinsi Sulawesi Selatan bersama *International Classification of Functioning for Disability and Healthy (ICF)* mengungkapkan bahwa jumlah penyandang disabilitas hingga tahun 2016 ini di Sulsel mencapai 82.170 orang. Sedangkan data menurut Dinas Sosial Kota Makassar jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang ada di Kota Makassar mencapai 1.390 orang (*pojoksulsel.com, 12 Mei 2016*).

Semakin besarnya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di kota Makassar tidak sebanding dengan perlakuan yang diberikan. Diskriminasi masih saja terus terjadi dan dirasakan oleh mereka yang berstatus disabilitas dan perlakuanpun masih jauh dari kesetaraan. Padahal penyandang disabilitas bukan hanya memiliki keterbatasan dan keterbelakangan semata, tetapi mereka juga memiliki kelebihan dan potensi yang tidak bisa mereka kembangkan karena kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat yang non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki keterampilan tersendiri yang mampu

mereka lakukan diluar batas pemikiran kita. Merekapun memiliki otak yang seharusnya kita bantu mereka untuk mengembangkan pemikirannya dengan memberikan pengetahuan yang lebih baik. Karena dengan memberikan pengetahuan dan pendidikan yang layak dapat membantu mereka untuk bangkit dari keterpurukan mereka agar bisa hidup lebih layak di lingkungan masyarakat.

Namun dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah belum memperlihatkan kehidupan yang layak bagi penyandang disabilitas. Pemerintah belum mampu membuat kehidupan mereka berdaya dan mampu diterima oleh masyarakat umum. Masih banyak tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah bahkan juga masyarakat non disabilitas untuk membantu para penyandang disabilitas mendapatkan kenyamanan dalam hidup mereka. Tidak lagi mendapat cacian dari masyarakat, tidak lagi merasa bahwa dirinya dan komunitasnya diperlakukan secara tidak merata, dan tidak lagi dianggap sebagai masalah dalam lingkungannya. Sehingga para penyandang disabilitas mampu menjalankan kehidupan dengan lebih layak dan lebih berdaya.

Pemberdayaan menurut (Mubarak, 2010) mengatakan bahwa pemberdayaan seharusnya dilakukan untuk membuat para penyandang disabilitas mampu melakukan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat, pemberdayaan itu dilakukan dengan tujuan membangkitkan semangat para penyandang disabilitas agar tidak terperangkap dengan pikiran negatifnya tentang disabilitas itu sendiri. Agar mereka bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya dapat mereka lakukan namun terhambat atau terhalangi karena mereka mengalami diskriminasi dengan statusnya sebagai disabilitas.

Sejak dari dulu pemerintah telah membuat berbagai program pemberdayaan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memandirikan dan melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan. Namun pada kenyataannya strategi pemberdayaan ini masih belum maksimal diaplikasikan dalam masyarakat penyandang disabilitas bahkan masyarakat eks penderita kusta. Masih banyak masyarakat yang belum berdaya dan terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemerintah tidak menyadari bahwa penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan wadah untuk mengembangkan kreativitas mereka supaya bisa hidup lebih mandiri dan percaya diri. Mereka juga memiliki kekuasaan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Kekuasaan dalam arti pemerintah mampu lebih dalam memberikan wewenang kepada penyandang disabilitas mengembangkan keterampilan mereka di bidang yang sesuai dengan kemampuannya.

Di Kota Makassar, Program MTR atau '*Makassar ta Tidak Rantasa*' (Makassar Tidak Berantakan/Kotor) merupakan bagian dari gerakan revolusi mental untuk membuat masyarakat sadar dan berperan aktif dalam meningkatkan kebersihan kota demi mewujudkan Kota Makassar yang bebas dari sampah. Setiap rumah akan disediakan 4 kantong plastik sampah untuk memudahkan warga membedakan sampah organik, sampah kertas, sampah kaleng dan sampah plastik. (*Liputan6.com*)

Sosialisasi program MTR Pemerintah Kota Makassar khususnya Bank Sampah pada kenyataannya lebih banyak dilakukan dan melibatkan masyarakat yang normal dan masih jarang dilakukan secara khusus kepada penyandang

disabilitas fisik seperti para penderita penyakit kusta. Meskipun pada dasarnya para penderita penyakit kusta merupakan bagian dari masyarakat dan bahkan sebagian dari mereka telah dinyatakan sembuh. Hal ini masih menunjukkan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas fisik bahkan masyarakat eks penderita kusta. Mereka selau ditempatkan dalam strata sosial yang rendah, bahkan hampir tidak diberi atau tidak memiliki peran yang berarti.

Permasalahan diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas fisik eks penderita kusta sangatlah kompleks sehingga menyulitkan mereka untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial bahkan untuk mendapatkan kesempatan dalam mengelola program pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat. Melihat kondisi ini dan melihat keberhasilan program Bank Sampah dalam memberdayakan masyarakat Kota Makassar, diharapkan pula program ini mampu memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas fisik seperti eks penderita kusta di Kota Makassar dengan melibatkan mereka dalam program Bank Sampah, memberikan pengetahuan, pelatihan dan pengajaran dalam pengelolaan sampah menjadi barang yang ekonomis dan bernilai jual.

Berdasarkan uraian di atas, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas fisik, seperti eks penderita kusta, salah satu lokasi para eks penderita kusta melanjutkan hidupnya dan terdapat program bank sampah ada di kompleks kusta Jongaya Kota Makassar. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul “Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang terkait khususnya pemerintah kota Makassar sebagai bahan untuk memperbaiki pemberdayaan bagi masyarakat disabilitas eks penderita kusta di Kota Makassar. Kemudian

untuk penyandang disabilitas agar mereka dapat mempejuangkan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas.

3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi Pemberdayaan

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sekelompok orang. Strategi secara etimologi berasal dari kata *strategia* yang merupakan bahasa Yunani yang berarti "*the art of general*". Kalimat tersebut diartikan sebagai seni yang biasa digunakan oleh panglima dalam sebuah peperangan supaya kelompoknya bisa menang. Namun, pengertian strategi tentunya tidak sederhana di masa sekarang. Maka dari itu banyak ahli yang memberikan definisi dari strategi secara umum berkaitan dengan sebuah organisasi.

(Siagian, 2004), memberikan definisi strategi sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dari sudut pandang lain, Marrus mengartikan strategis sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana supaya tujuan tersebut dapat tercapai.

2. Proses Strategi

Seperti yang dikatakan oleh (Ross dan Michael dalam Rahmayanti, 2015), bahwa sebuah organisasi tanpa strategi bagaikan kapal tanpa kemudi, bergerak berputus tanpa lingkaran. Organisasi yang dimiliki seperti pengembara, tanpa adanya tujuan tertentu. David dalam (Rahmayanti, 2015), menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan mengevaluasi strategi.

a. Perumusan strategi

Dalam merumuskan strategi termasuk didalamnya, adalah pengembangan tujuan, mengenali peluang dan ancaman eksternal, menetapkan suatu obyektifitas, menghasilkan strategi alternative, memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam suatu proses kegiatan.

Teknik perumusan strategi yang penting dapat didukung menjadi kerangka kerja diantaranya :

- a) Tahap input (masukan)
- b) Tahap pencocokan
- c) Tahap pemutusan

b. Pengimplementasian strategi

Implementasi strategi termasuk adanya pengembangan dalam mendukung strategi, mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, serta memanfaatkan berbagai sistem informasi. Implementasi sering disebut tahapan tindakan, karena implementasi berarti memobilisasi manusia yang ada dalam sebuah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Tahap ini merupakan tahap paling sulit karena memerlukan kedisiplinan, komitmen, pengorbanan serta kerja sama yang merupakan kunci dari berhasil atau tidaknya tindakan.

c. Evaluasi strategi

Merupakan dari tahap akhir strategi, ada tiga macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi :

- a) Menuju faktor-faktor eksternal (berupa peluang dan ancaman) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang menjadi dasar asumsi pembuatan strategi.
- b) Mengukur prestasi (membanding hasil yang diharapkan dengan kenyataan).
- c) Mengambil tindakan kreatif untuk memastikan bahwa prestasi diluar rencana. Dalam mengambil tindakan kreatif tidak harus berarti bahwa strategi yang sudah akan ditinggalkan, bahkan strategi baru harus dirumuskan. Seperti menurut David dalam (Rahmayanti, 2015), bahwa:

“tindakan kreatif diperlukan jika tindakan atau hasil tidak sesuai dengan yang dibayangkan atau pencapaian yang direncanakan maka disitulah tindakan kreatif dilakukan”.

Segala kegiatan kreatif harus konsisten secara internal dan bertanggung jawab secara sosial, evaluasi diperlukan karena keberhasilan hari ini bukan merupakan jaminan keberhasilan dimasa depan. Evaluasi strategi sangat penting untuk memastikan sasaran yang telah dicapai. Evaluasi strategi perlu untuk semua organisasi dari semua kegiatan dengan mempertanyakan dan asumsi manajerial, harus memicu tujuan dan nilai-nilai merangsang kreativitas.

3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *'power'* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Sipahelut, 2010).

Konsep *empowerment* pada dasarnya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, keluarga, regional, international, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Menurut (Mubarak, 2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya selaku anggota masyarakat.

Dari sudut pandang yang lain, (Suharto, 2005) pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah salah satu contohnya seperti penyandang disabilitas, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari hinaan, bebas dari kesakitan dan lain-lain;
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Sipahelut, 2010 dalam Edi Suharto, 2015).

1) Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat harus betul-betul diperhatikan, dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah, bukan sebaliknya yaitu mengutamakan kepentingan yang berkuasa. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu,

perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat menurut (Widjaja, 2003) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Sedangkan menurut (Sumaryadi, 2005) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/ dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka,

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Sebelum menuju proses pemberdayaan maka diperlukan tahapan awal yaitu pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun *supportive communities*, yaitu sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi, dan upaya saling mendorong antara satu dengan yang lain.

Sementara itu, *World Bank* mengartikan pemberdayaan sebagai perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan, memengaruhi, mengontrol, dan mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya (*empowerment is expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control and hold accountable institutions that affect their live*) (Deepa Narayan dalam Zubaedi, 2013). Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya agar masyarakat semakin mandiri. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas, adalah

penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun sistem atau jejaring antar individu dan kelompok/organisasi sosial, serta pihak lain diluar sistem masyarakatnya sampai diarus global.

2) Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat memiliki tahapan (Sulistiyani, 2004 dalam Sukmaniar, 2007) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap tersebut meliputi :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tabel 2.1 Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat

TAHAPAN EFEKTIF	TAHAPAN KOGNITIF	TAHAPAN PSIKOMOTORIK	TAHAPAN KONATIF
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki keterampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa	Menguasai	Menguasai	Bersedia terlibat

kesadaran dan kepedulian	pengetahuan dasar	keterampilan dasar	dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan keterampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat lebih tinggi	Memperkaya variasi keterampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sumber: Sukmaniar, 2007

4. Tujuan Pemberdayaan

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa “pemberdayaan” merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu-hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya. Mengacu pada konsep-konsep pemberdayaan di atas, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*), dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

- 2) Perbaiki aksesibilitas (*better accessibility*), tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- 3) Perbaiki tindakan (*better action*), berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
- 4) Perbaiki kelembagaan (*better institution*), perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitrausahaan.
- 5) Perbaiki usaha (*better business*), perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 6) Perbaiki pendapatan (*better income*), terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 7) Perbaiki lingkungan (*better environment*), perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

- 8) Perbaiki kehidupan (*better living*), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 9) Perbaiki masyarakat (*better community*), keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula (Mardikanto, 2013).

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pemberdayaan, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu: pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat; ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Menurut Jim Ife ada tiga strategi yang diterapkan untuk pemberdayaan masyarakat:

1. Perencanaan dan kebijakan (*planning and policy*), untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Perencanaan dan kebijakan yang berpihak dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan.
2. Aksi sosial dan politik (*social and political action*), diartikan agar sistem politik yang tertutup diubah sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang dalam memperoleh kondisi berdaya.
3. Peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan diperparah dengan tidak adanya *skill* untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Untuk masalah ini peningkatan kesadaran dan pendidikan dapat diterapkan. Contoh memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana struktur penindasan terjadi, memberi sarana dan *skill* agar mencapai perubahan secara efektif.

Dalam hubungan strategi pemberdayaan dengan menggabungkan teori dari Ismawan (Priyono, 1996 dan Suharto, 1997) mengenai strategi pemberdayaan, maka terdapat empat program strategi pemberdayaan, yaitu:

1. Pengembangan sumberdaya manusia

Pengembangan sumberdaya manusia dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan serta melalui pelatihan-pelatihan ataupun pengalaman yang dikombinasikan, baik pengetahuan atau pengalaman dari diri sendiri maupun dari luar atau orang lain.

2. Pengembangan usaha produktif

Pengembangan usaha produktif adalah perbuatan atau kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga dan atau kelompok usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.

3. Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap keluarga perlu dirorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di lingkungannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan kemampuan mereka sendiri.

4. Pembangunan dan pengembangan jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai system sosial di

sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

B. Penyandang Disabilitas Fisik

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

a. Jenis-Jenis Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas memiliki banyak jenis yang dimana jenis tersebut berbeda-beda dan memiliki kriteria masing-masing. Namun apapun jenis dari disabilitas itu kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Adapun jenis-jenis disabilitas yaitu, antara lain disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik dan disabilitas perkembangan. Kemudian adapun jenis disabilitas bagi masyarakat eks penderitanya adalah disabilitas fisik. Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga epilepsy (Mandiri, 2015).

Menurut (Marjuki, 2010), penyandang cacat fisik adalah kelainan fisik, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi penyandangannya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Jenis-jenis penyandang disabilitas fisik :

- 1) Cacat tubuh yaitu cacat yang terjadi karena anggota tubuh tidak lengkap. Ketidaklengkapan ini merupakan bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan, misalnya: amputasi tangan, paraplegi, kecacatan tulang, cerebal palsu.
- 2) Cacat runtu wicara yaitu:

Kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit.

Jenis kecacatan ini terdiri dari:

- a) Cacat rungu dan wicara
 - b) Cacat rungu
 - c) Cacat wicara
- 3) Cacat netra yaitu:

Cacat yang dialami seseorang sehingga terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit.

Jenis kecacatan ini terdiri dari:

- a) Buta total artinya seseorang tidak dapat melihat sama sekali obyek didepannya.

Jadi fungsi penglihatannya telah hilang

- b) Persepsi cahaya artinya seseorang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan obyek atau benda apa yang ada didepannya.

- c) Memiliki sisa penglihatan atau sering disebut *low vision*.

Artinya seseorang dapat melihat samar-samar benda yang didepannya dan tidak dapat melihat jari-jari yang digerakkan dalam jarak 1 meter.

Penyandang disabilitas fisik biasa juga disebut penyandang cacat tubuh adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak

yang meliputi tulang, otot dan persendian baik dalam struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Cacat tubuh juga disebut cacat *orthopedic* dan cacat *musculoskeletal* yang berarti cacat yang ada hubungannya dengan tulang, sendi, dan otot. (Renaldi, 2013).

b. Eks Penderita Kusta

Penderita kusta adalah orang yang mengalami penyakit menular yang menahun disebabkan oleh kuman kusta (*mycobacterium leprae*) yang menyerang saraf tepi kulit dan jaringan tubuh lainnya. Eks penderita kusta adalah penderita penyakit kusta yang telah disembuhkan dari penyakit kusta. Dengan demikian eks penderita kusta adalah seseorang penderita yang secara medik dinyatakan sembuh dari suatu penyakit yang dinilainya memerlukan pengobatan yang sangat lama (menahun) dan telah sembuh dengan atau tanpa menimbulkan kecacatan pada tubuh yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi sosialnya (Anonymons, 2002).

Eks penderita kusta sebagai individu masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan mereka berhak mendapatkan sosial yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Eks penderita kusta adalah mereka yang dulunya menderita penyakit menular yang sifatnya kronis dan menyerang saraf-saraf (saraf motorik, sensorik, dan otonom) dan kulit dimana mereka sudah mendapatkan rehabilitasi secara medis dan sosial.

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CRPD) yaitu konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak disabilitas di Indonesia (*Development tool and human rights instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabatnya sebagai bagian yang tak terpisahkan (*inherent dignity*). Kemudian Dalam Perda Kota Makassar Pasal 1 Ayat 49 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, yaitu :

1. Persamaan dan non-diskriminasi, setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan efektif terhadap diskriminasi dengan fundamental alasan apapun.
2. Penyandang disabilitas perempuan. Penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi berlipat-lipat. Oleh karena itu pemerintah harus menjamin pemenuhan secara utuh dan sama dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, pengembangan, pemberdayaan perempuan secara utuh.
3. Penyandang disabilitas anak-anak, pemerintah wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anak-anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, dengan catatan pandangan mereka diberikan bobot sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar persamaan dengan anak-anak lain, serta untuk disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak itu dapat terpenuhi.
4. Peningkatan kesadaran. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk di tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas.

5. Aksesibilitas, agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam aspek kehidupan, pemerintah wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, serta termasuk akses pada fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka untuk publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

3. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan suatu tugas kita bersama baik pemerintah, swasta maupun masyarakat biasa. Karena ketika semua sadar dan paham akan penderitaan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas maka sudah pasti kita akan memperhatikan mereka, bukan malah sebaliknya yaitu mendiscriminasinya. Pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dimaksudkan untuk membuat para penyandangnyanya tersebut mampu lebih memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kekuasaan untuk mempengaruhi dirinya sendiri agar mampu bersikap lebih mandiri, mampu melakukan hal-hal yang seharusnya dapat mereka lakukan.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan

upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. (Sumodiningrat, 2002)

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 dalam Sukmaniar, 2007). Ketiga konsep pemberdayaan itu sendiri dapat menjadi penentu keberdayaan masyarakat. Berikut beberapa penjelasan mengenai konsep pemberdayaan :

1. Keterampilan

Pada hakikatnya keterampilan adalah suatu ilmu yang diberikan kepada manusia, kemampuan manusia dalam mengembangkan keterampilan memang tidak mudah, perlu mempelajari, perlu menggali agar lebih terampil. Keterampilan diartikan sebagai kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang meliputi semua tugas-tugas kecakapan, sikap, nilai dan kemengertian yang semuanya dipertimbangkan sebagai sesuatu yang penting untuk menunjang keberhasilannya dalam penyelesaian tugas. Dimana keterampilan itu sendiri dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu keterampilan fisik dan keterampilan intelektual.

2. Pengetahuan

Semua orang membutuhkan pengetahuan untuk menjalani kehidupan mereka secara baik. Tanpa pengetahuan maka akan banyak orang yang salah dalam mengambil keputusan dan pilihan. Untuk mendapatkan pengetahuan seseorang harus melewati proses belajar, mencari, mengamati, dan menganalisis. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengetahuan bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan adalah segala hal yang diperoleh dari proses persentuhan panca indera terhadap objek tertentu, bisa pula melalui proses belajar, dan mengamati sekitar.

3. Kekuasaan

Arti dari kekuasaan secara umum dirumuskan sebagai kemampuan seorang pelaku untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang sehingga sesuai atau persis dengan keinginan pelaku yang memiliki kekuasaa. Pengertian kekuasaan menurut (Max Weber dalam buku *Wirtschaft und Gessellshaft* tahun 1992) bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk (dalam suatu hubungan sosial) melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuannya.

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada

hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010).

C. Koordinasi

Menurut G.R Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sementara itu (Handoko, 2003) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien.

Apabila kita cermati dari serangkaian literatur tentang konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

Suatu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baik secara personal maupun kelompok, maka diperlukan adanya koordinasi antar lembaga yang bersangkutan. Koordinasi oleh (Hasibuan, 2006) dimaksudkan sebagai kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Kedudukan koordinasi dalam proses pemberdayaan masyarakat diharapkan agar proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas didalam suatu organisasi atau kelompok agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun ciri dan fungsi dalam koordinasi menurut (Handayani, 1989), yaitu antara lain:

1. Adanya tanggungjawab, dimana tanggungjawab tersebut dipegang pada pemimpin. Oleh karena itu, koordinasi merupakan tanggungjawab dan wewenang dari pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena telah melakukan koordinasi dengan baik.
2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari

berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.

D. Konsep Bank Sampah

Menurut peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, bank sampah adalah tempat untuk memilah dan mengumpulkan sampah yang masih bisa di daur ulang dan/atau digunakan ulang dan masih memiliki nilai ekonomi. Program bank sampah menurut Kementerian lingkungan hidup dalam buku Profil Bank Sampah Indonesia 2013 merupakan kegiatan bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA.

Pengolahan sampah merupakan salah satu upaya dalam implementasi 3R (*reuse, reduce, recycle*). Implementasi tersebut dilakukan melalui mekanisme kerja bank sampah seperti pemilahan sampah, kemudian berlanjut pada penyerahan sampah yang telah dipilah ke bank sampah. Di bank sampah, sampah tersebut ditimbang dan dicatat hasil penjualan sampah yang dibawa dalam buku tabungan masing-masing milik anggota. Dilaksanakan sistem bagi hasil penjualan sampah yang telah ditabung antara nasabah dan pengelola bank sampah.

Kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah perlu dilakukan agar kegiatan ini dapat berkembang. Adanya peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga, memberikan bukti bahwa pemerintah juga memperhatikan soal sampah yang terus meningkat. Konsep bank sampah terdiri dari lima kegiatan (5M) diantaranya mengurangi sampah, memilah sampah, memanfaatkan sampah, mendaur ulang sampah, dan menabung sampah.

Program Makassar Tidak Runtas merupakan program gebrakan walikota Makassar. Dengan gerakan membersihkan kota Makassar ini sebenarnya sangat diharapkan sebagai upaya bersama warga kota Makassar untuk menegakkan siri atau rasa malu sebagai warga kota Makassar yang tidak rantasa atau dengan kata lain masyarakat yang tidak kotor. Salah satu terobosan dari program Makassar tidak rantasa adalah program bank sampah. Kehadiran bank sampah diharapkan dapat merubah paradigma masyarakat tentang sampah yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Sampah yang dulunya hanya sebagai kotoran, kini dapat masyarakat manfaatkan dan ubah menjadi sebuah sampah yang memiliki nilai ekonomis. Sampah menjadi sumber pemberdayaan ekonomis masyarakat dengan daur ulang menjadi barang-barang cantik dan unik yang bisa menghasilkan uang.

Pengelolaan sampah merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mengurangi timbunan sampah yang bertambah setiap hari volumenya semakin besar. Sebagaimana Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang memuat bahwa masyarakat diberdayakan dalam pengelolaan sampah organik

melalui komposter aerob dan keranjang Takakura Pengelolaan sampah secara mandiri ini mengutamakan peran komunitas melalui wadah bank sampah untuk mampu mengelola sampah yang dihasilkan dalam skala terkecil, yaitu rumah tangga. Kehadiran bank sampah di kota Makassar tentunya dapat memberikan manfaat terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Dimana sampah yang dulunya hanya dibuang kini dapat disulap menjadi uang.

E. Kerangka Fikir

Penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam penelitiannya. Melalui kerangka pikir ini, maka tujuan dilakukan penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu. Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Hambatan yang mereka hadapi adalah masih sangat termarginalkan dalam lingkungan sosial mereka, dimana stigma masyarakat pada umumnya menganggap para penyandang disabilitas sebagai suatu masalah, bahkan eks penderita kustapun yang telah dianggap sembuh masih mendapat hambatan yang sama. Untuk mengurangi hambatan yang mereka hadapi maka salah satu jalan yang dapat dilakuakn adalah dengan

cara pemberdayaan. Untuk lebih jelasnya maka akan digambarkan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini berangkat dari masalah yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai strategi pemberdayaan yang dimana termasuk, keterampilan, pengetahuan, kekuasaan, dan koordinasi.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi mengenai fokus penelitian itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Keterampilan merupakan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang meliputi tugas-tugas, kecakapan, sikap, nilai dan segala sesuatu yang menunjang pada keberhasilan seseorang.
- 2) Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat dibenak orang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengetahuan atas suatu pola.
- 3) Kekuasaan merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- 4) Koordinasi dimaksudkan sebagai suatu kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Faktor pendukung dan penghambat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik Kota Makassar, dimana faktor tersebut dapat menentukan berhasil atau tidaknya para penyandang disabilitas untuk mampu hidup lebih berdaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan lamanya yaitu April – Mei 2017 atau setelah adanya izin penelitian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu di kompleks kusta Jongaya Kota Makassar, dengan dasar pertimbangan memilih lokasi tersebut karena data ataupun dokumen-dokumen yang sesuai dengan pemberdayaan penyandang disabilitas eks kusta dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah dapat diperoleh dari lokasi tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang kerap dilakukan kalangan awam, akademisi, maupun ilmuwan. Untuk mencapai hasil-hasil yang memuaskan dibutuhkan metodologi penelitian yang meliputi langkah-langkah, dalil-dalil, dan proses yang sistematis serta didukung oleh data yang akurat. Adapun tipe dan jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu :

1. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi secara langsung, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.
2. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian fenomenologi, yang menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman

yang didasari oleh kesadaran yang terjadi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas eks kusta. Fenomenologi dilakukan dalam situasi alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisa data yang diperoleh.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu:

1. Data primer, data ini adalah data yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara yang diperoleh dari informan diantaranya: Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Ketua RT serta masyarakat eks penderita kusta yang ada di kompleks kusta Jongaya Kota Makassar.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Informan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan yang namanya informan untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun yang akan memberikan informasi kepada peneliti atau yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu beberapa instansi yang terkait seperti :

Tabel 3.1 Jumlah Informan

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN/ INSTANSI	KETERANGAN

1	Hasnah A,S.Sos, M.Si	HA	Kepala seksi rehabilitas penyandang cacat Dinas Sosial Kota Makassar	1 orang
2	Maria UN	MU	Ketua himpunan wanita disabilitas Indonesia	1 orang
3	Nuraeni	NU	RT 05 Kompleks Kusta Jongaya	1 orang
4	Rahmat	RA	Penata dan Pemilah Sampah Bank Sampah Kota Makassar	1 orang
5	Syarif	S	Staff Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar	1 orang
6	Penyandang Disabilitas			3 orang
Jumlah				8 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi sebagai bahan melakukan penilaian terhadap strategi pemasaran potensi unggulan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui dua teknik antara lain:

1. Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui langsung ke lokasi penelitian (*field research*) untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Metode observasi lapangan

Observasi dimaksudkan untuk mengamati data empiris di lapangan serta melakukan pencatatan. Langsung mendatangi lokasi perkampungan

disabilitas yang berada di kompleks kusta Jongaya Kota Makassar dan melihat langsung masalah yang terjadi dilapangan.

b. Metode wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya-jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan informan yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti.

c. Metode dokumentasi.

Metode ini akan dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi perkampungan disabilitas yang berada di kompleks kusta Jongaya Kota Makassar untuk memperoleh data tentang proses pemberdayaan penyandang disabilitas.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder yaitu data yang diperlukan untuk mendukung data primer. Pada penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan dari observasi lapangan dan dari para informan. Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013), yaitu:

1. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting dari data yang diperoleh di lapangan yang jumlahnya banyak, sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi laporan lapangan sebagian bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema, dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, penyajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
3. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Keabsahan Data

Penelitian metodologi kualitatif pengabsahan data menggunakan metode triangulasi, dimana metode ini merupakan pengecekan akan kebenaran data dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya serta

pengecekan pada waktu yang berbeda. Triangulasi terdiri atas tiga bagian, antara lain :

1. Triangulasi sumber data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian menganalisis mana data yang sama dari sumber yang didapatkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dibuatkan kesepakatan (*member check*) dari sumber data.

2. Triangulasi metode

Dilakukan untuk menguji sumber data, memiliki tujuan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data peneliti melakukan wawancara dengan informan dalam kondisi waktu yang berbeda untuk menentukan kredibilitas data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Deskripsi umum hasil penelitian dipaparkan dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberi gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian dan juga menjadi bahan informasi guna menganalisis lebih lanjut tentang strategi pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

a. Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu diubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No.16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota madya. Dan Akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2010.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No.50 Makassar, kelurahan Ujung Pandang Baru, kecamatan Tallo kota Makassar. Kode pos: 90211. Telepon/Fax: (0411) 448313. Kantor Dinas Sosial Kota Makassar berdiri di atas tanah seluas 499 m², dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo kota Makassar
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan rakyat
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan jalan ujung pandang baru
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan perumahan rakyat.

1. Tugas Pokok dan Kewenangan Dinas Sosial Kota Makassar

1) Kepala Dinas

Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada point 1, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.

- b) Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- c) Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- d) Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
- e) Melakukan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.

c) Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

d) Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan pelaksanaan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran.

3. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan

kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.

4. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan.

5. Kewenangan Dinas Sosial

Kewenangan Dinas Sosial diantaranya :

- a) Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten/ kota dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b) Penyuluhan dan bimbingan sosial;
- c) Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- d) Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti);
- e) Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup kabupaten/kota;
- f) Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti);
- g) Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat;

- h) Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, dan eks narapidana);
- i) Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi;
- j) Pemberdayaan karang taruna / organisasi kepemudaan;
- k) Pemberdayaan organisasi sosial / LSM lingkup kabupaten / kota;
- l) Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat;
- m) Pemberdayaan dunia usaha (partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial);
- n) Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup kabupaten/kota;
- o) Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten/kota;
- p) Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia);
- q) Penanggulangan korban napza;
- r) Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga;
- s) Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja;
- t) Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota;
- u) Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota;

- v) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten / kota;
- w) Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Adapun sasaran dari bidang Kewenangan tersebut adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain meliputi :

- a) Penyandang cacat

Pelayanan sosial yang diberikan bagi penyandang cacat adalah pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat melalui Departemen Sosial RI.

- b) Eks kusta

Eks kusta adalah seseorang yang pernah menderita penyakit kusta dan telah dinyatakan sembuh secara medis, tetapi mengalami hambatan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari karena dikucilkan keluarga atau masyarakat. Penanganan yang diberikan bagi eks kusta adalah pembedayaan keluarga eks kusta.

Tabel 4.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar

NO	JENIS KECACATAN	JUMLAH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TUNA DAKSA	7	15	22 Orang
2	TUNA NETRA	108	66	174 Orang

3	TUNA RUNGU WICARA	24	25	49 Orang
4	ODK BERAT YANG DAPAT JAMINAN	264	181	445 Orang
5	EKS KUSTA	405	295	700 Orang
	JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS	808	582	1.390 Orang

Sumber : Dinas Sosial, 2015.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar memang terbilang banyak yaitu 1.390 orang, dimana jenis kecacatan yang paling tinggi adalah penderita eks kusta. Karena memang pada kenyataannya seseorang gampang terkena penyakit kusta yang disebabkan oleh virus mycobacterium leprae yang dapat menyerang kulit, saraf, mata, selaput lender hidung, otot, tulang dan buah zakar. Penyerangan virus tersebut mudah menyebar melalui udara, tanah, dan saraf kulit.

B. Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar

Peran pemerintah sangat penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik untuk meningkatkan harkat dan martabat mereka serta kemandirian penyandang disabilitas fisik. Dinas Sosial Kota Makassar sebagai instansi yang memiliki peran dalam hal memberdayakan penyandang disabilitas dan menangani langsung para penderita penyandang disabilitas tersebut, serta mendukung program Makassar Tidak Rantasa juga memiliki

peran menangani permasalahan penyandang disabilitas kota Makassar. Khususnya dibidang Rehabilitas Penyandang Cacat telah memberikan pelatihan daur ulang kepada penyandang disabilitas fisik. Untuk meninjau dan mengetahui lebih lanjut peran pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar sebagai pelaksana pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dengan melakukan beberapa hal ataupun strategi dalam memberdayakan penyandang disabilitas adalah (1) keterampilan, (2) pengetahuan, dan (3) kekuasaan. Hasil pengkajian terhadap ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keterampilan

Keterampilan merupakan kemampuan seseorang terhadap suatu hal, dimana keterampilan ini sangat penting untuk dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan minat dari penyandang disabilitas fisik. Dengan mengembangkan keterampilan tersebut maka penyandang disabilitas juga mampu meningkatkan taraf hidup mereka serta mampu hidup lebih mandiri dalam lingkungan masyarakat luas. Oleh karena itu penyandang disabilitas fisik diberikan pembekalan keterampilan sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing.

1. Pelatihan/Pembinaan Keterampilan

Pelatihan atau pembinaan keterampilan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengetahui serta meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Dalam pelatihan ini juga

Dinas Sosial Kota Makassar sebagai penanggungjawab dalam pembinaannya mulai mengelompokkan para penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Rehabilitas Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Makassar dalam wawancara sebagai berikut :

“Sebelum melakukan keterampilan tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar sebelumnya memberikan pelatihan tentang keterampilan kemudian menyeleksi atau mengelompokkan penyandang disabilitas yang masih potensial atau mampu melakukan keterampilan tersebut sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Karena terkadang dengan keterbatasannya itu menyulitkan mereka dalam mengembangkan potensinya....” (wawancara dengan HA, 10 Mei 2017).

Menanggapi hasil wawancara diatas, telah menunjukkan komitmen Dinas Sosial Kota Makassar dalam melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas fisik, hal ini bertujuan untuk memberikan keterampilan sesuai dengan minat mereka. Sehingga keterampilan yang nantinya diberikan akan mampu mereka kembangkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Pemberian keterampilan oleh Dinas Sosial Kota Makassar kepada penyandang disabilitas fisik, yaitu berupa pelatihan menjahit; cara mendaur ulang limbah plastik menjadi keranjang, bunga hias, bros dan lampion; serta keset dari kain perca.

Adanya pendampingan massif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, disambut sangat baik oleh para penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada NA selaku Ketua RT

05 Kompleks Kusta Jongaya, sebagai berikut:

“kami sangat antusias dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, karena kami bisa belajar mendaur ulang limbah plastik dan kain perca. Dengan pelatihan keterampilan tersebut juga sedikit membantu perekonomian kami dari hasil penjualan yang diperoleh...”
(wawancara dengan NA, 1 Juni 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik kepada penyandang disabilitas Kota Makassar dengan berbagai tindakan yang dilakukan. Karena dapat kita ketahui bersama bahwa kehidupan penyandang disabilitas pada umumnya banyak yang mengalami tekanan dengan keterbatasan yang mereka miliki. Oleh karena itu sudah menjadi tugas kita untuk sama-sama memberdayakan mereka dengan lebih membuat mereka hidup layak dan normal dilingkungan masyarakat.

2. Melakukan Penerapan Keterampilan

Pada dasarnya pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dengan tujuan agar para penyandang disabilitas fisik terdidik menjadi lebih baik dalam segala hal termasuk terampil dalam memanfaatkan sumber daya ataupun limbah menjadi sesuatu yang berdayaguna. Pada penelitian ini menemukan bahwa salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar kepada penyandang disabilitas fisik Kota Makassar adalah keterampilan yang berupa:

a. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah seperti plastik menjadi keranjang, bunga hias, bros dan lampion. Limbah plastik tersebut diolah menjadi barang-barang yang berguna dan bernilai ekonomis. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu penyandang disabilitas, yang mengatakan bahwa:

“keterampilan yang diajarkan kepada kami yaitu membuat keranjang dari bekas minuman teh gelas, membuat bunga hias, membuat bros dari plastik bekas *sunlight*, dan juga diajarkan membuat lampion” (wawancara dengan T, pada 14 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas memang telah diberikan pembekalan atau pelatihan keterampilan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan limbah dan mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis. Penyandang disabilitas juga sudah mampu membuatnya sendiri dan bisa mendapatkan penghasilan dari beberapa keterampilan yang sudah mereka buat.

Selain itu pengelolaan sampah yang dilakukan penyandang disabilitas adalah membuat keset dari perca kain. Keterampilan membuat keset ini juga menjadi salah satu keterampilan yang diajarkan dan mampu membantu perekonomian penyandang disabilitas. Sebagaimana hasil wawancara dari salah satu penyandang disabilitas yang mengatakan bahwa:

“kami juga diajarkan untuk membuat keterampilan seperti keset kaki dengan menggunakan kain yang sudah tidak

terpakai lagi atau perca kain. Kami juga bisa memanfaatkan pakaian yang sudah tidak dipakai lagi tapi kainnya masih bagus untuk dibuat keset kaki tersebut...” (wawancara dengan T , pada 14 Juli 2017)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar telah memberikan perhatian kepada masyarakat penyandang disabilitas fisik Kota Makassar untuk mampu mengasah keterampilan yang dimilikinya sehingga dapat lebih mandiri dan mampu lebih berdaya dalam menjalani kehidupan mereka. Dengan mengasah keterampilan tersebut penyandang disabilitas juga dapat memproduksinya sendiri baik untuk mereka gunakan sendiri maupun dijual untuk menambah penghasilan mereka.

Kemudian pemasarannya dilakukan dalam pameran-pameran yang diadakan pada event tertentu di Kota Makassar dan juga dengan bantuan dari Bank Sampah Kota Makassar, selain itu pemasaran atau penjualan juga mereka lakukan dengan cara individu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu penyandang disabilitas (NI) sebagai berikut:

“kami pernah menjual hasil keterampilan kami melalui pameran-pameran maupun penjualan secara individu dengan hasil sebanyak kurang lebih Rp.200.000,- para pengunjung dominan tertarik dengan keterampilan kami seperti lampion dan bunga hias.” (wawancara dengan NI, pada 14 Juli 2017)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kehidupan penyandang disabilitas fisik dapat lebih terbantu dengan adanya

keterampilan dalam pengelolaan sampah. Penyandang disabilitas juga sudah mampu membuat keterampilan sendiri dengan modal pengetahuan yang telah diajarkan dalam pelatihan keterampilan tersebut dan mampu menambah penghasilan mereka dari hasil penjualannya sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam menjalani kehidupannya tanpa harus bergantung lebih kepada orang lain.

b. Keterampilan Menjahit.

Keterampilan menjahit merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Karena dengan keterampilan tersebut penyandang disabilitas mampu membuat sesuatu yang bernilai ekonomis dan mampu hidup lebih mandiri. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas Sosial

Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai harapan besar untuk membuat penyandang disabilitas lebih berdaya dengan memberikan pelatihan keterampilan menjahit agar mereka mampu mengasah potensi yang mereka miliki dan mampu hidup lebih mandiri” (wawancara dengan HA, 10 Mei 2017).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar menjalankan tanggung jawab dengan baik dengan berbagai cara untuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Wawancara di atas juga

didukung dengan hasil wawancara salah satu penyandang disabilitas yang mengatakan bahwa:

“salah satu keterampilan yang diajarkan kepada kami yaitu menjahit, dengan diberikan fasilitas juga seperti mesin jahit, mesin obras dan kain jadi kami bisa belajar menjahit dan membuat sesuatu yang bisa menghasilkan uang” (wawancara dengan T, pada 14 Juli 2017).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa keterampilan menjahit mampu menjadi salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk membuat kehidupan penyandang disabilitas menjadi lebih kreatif dan termotivasi untuk terus berusaha mengembangkan kelayakan hidup mereka yang minoritas dimasyarakat.

Dari beberapa keterampilan di atas, berikut tabel jumlah penyandang disabilitas yang terlibat dalam pelatihan pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Tabel 4.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Dalam Pengelolaan Sampah

NO	JENIS KETERAMPILAN	JUMLAH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pembuatan Kaset Kaki	0	38	38
2	Pembuatan Lampu Hias (Lampion)	20	0	20
3	Pembuatan Bros	0	40	40

	Jumlah Penyandang Disabilitas	20	78	98 Orang
--	-------------------------------	----	----	----------

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas yang terlibat dalam pelatihan pengelolaan sampah sebanyak 98 orang yang didominasi oleh perempuan yang berjumlah 78 orang dan laki-laki berjumlah 20 orang. Karena memang dalam pelatihan keterampilan pengelolaan sampah tersebut penyandang disabilitas yang perempuan lebih aktif dan lebih antusias dibandingkan dengan penyandang disabilitas laki-laki. Selain itu memang dari awal penyandang disabilitas yang terlibat memang lebih banyak dari mereka yang berjenis kelamin perempuan.

b. Pengetahuan Tentang Pengelolaan Sampah

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat dibenak orang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengetahuan atas suatu pola.

Peran Pemerintah dalam memberdayakan kelompok penyandang disabilitas fisik sangat menunjang pembentukan karakter yang dapat mengangkat harkat dan martabat para penyandang disabilitas fisik. Selain Pemberian Keterampilan, pemberian pengetahuan juga sangat penting agar sebuah usaha yang telah dirintis oleh masyarakat penyandang disabilitas fisik dapat berkesinambungan, serta memotivasi untuk lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya.

Dinas Sosial Kota Makassar sebagai mentor pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas fisik, sering melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Sosialisasi ini dimaksudkan sebagai bentuk pemberian pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan peluang dan menjaga kebersihan lingkungan tetapi tetap berdaya dan berhasilguna. Sebagaimana hasil wawancara terhadap Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Pemberian pengetahuan tentang sampah dan pengelolaannya ini kepada penyandang disabilitas fisik sangat penting, karena disamping mereka dapat menghasilkan uang dari sampah tersebut program pemerintah juga yang mengenai Makassar’ Tidak rantasa dapat terealisasikan dengan baik dimasyarakat...” (wawancara dengan HA, pada 10 Mei 2017)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas dengan memberikan pengetahuan pengelolaan sampah tersebut agar mampu membuat hidup mereka menjadi lebih kreatif dan mandiri. Dengan adanya pengetahuan tentang pengelolaan sampah juga dapat membantu penyandang disabilitas memanfaatkan sampah atau limbah rumah tangga untuk dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Wawancara lain dengan salah satu penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar, sebagai berikut :

“pengetahuan tentang pengelolaan sampah itu sangat bermanfaat bagi kami karena kami dapat menghasilkan uang dari sampah tersebut dengan adanya Bank Sampah di kompleks kami dan juga dapat menjaga lingkungan agar tetap bersih, selain itu kami juga bisa dapat keuntungan dari hasil penjualan keterampilan dari sampah yang sudah kami buat dengan kreasi sendiri...”. (wawancara dengan NI, 14 Juli 2017)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar selaku mentor pemberdayaan penyandang disabilitas telah memberikan jalan bagi penyandang disabilitas fisik untuk bisa berusaha meningkatkan penghasilan mereka dengan memanfaatkan sesuatu yang kebanyakan orang menganggapnya tidak berguna yaitu sampah. Penyandang disabilitas juga mampu lebih percaya diri dan lebih yakin dalam menjalani kehidupan mereka yang minoritas dilingkungan masyarakat secara umum, karena mereka sudah mampu bersaing tanpa memikirkan keterbatasan yang mereka miliki.

Pengetahuan pengelolaan sampah juga diharapkan mampu mengubah pola pikir para penyandang disabilitas fisik. Dinas Sosial Kota Makassar sebagai penanggungjawab pelaksana pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas sudah sangat berusaha agar para penyandang disabilitas mampu mengubah pola pikir mereka setelah pemberian pengetahuan keterampilan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitas Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Makassar bahwa:

“Perilaku ataupun pola pikir penyandang disabilitas setelah mendapat bimbingan dan pelatihan hanya beberapa yang mengembangkan dan melanjutkan produksi seperti keset kaki. Masih banyak pula penyandang disabilitas tuna daksa yang pemalas dan masih sulit untuk merubah pola pikirnya khususnya bagi penyandang disabilitas yang aktif sebagai pengemis” (Wawancara dengan HA, 10 Mei 2017)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar sedikit mengalami kesulitan untuk mengubah pola pikir seluruh penyandang disabilitas Kota Makassar yang memiliki karakter yang

berbeda-beda. Karena tidak semua penyandang disabilitas yang ingin berusaha dengan kreativitas mereka untuk menambah penghasilan, namun banyak dari mereka yang sudah terlalu menikmati pekerjaan mereka dengan mengemis di jalan atau di tempat-tempat tertentu tanpa memikirkan resiko yang ditimbulkan. Tidak sedikit dari mereka juga yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dengan berusaha menambah penghasilan mereka tanpa harus mengemis di jalanan.

Selain pengetahuan pengelolaan sampah tentang daur ulang sampah para penyandang disabilitas juga diberikan pengetahuan tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah. Karena pemerintah juga telah memperluas program bank sampah dengan cara memperadaknya disetiap RT/RW di Kota Makassar. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah juga sangat penting karena tidak semua sampah bisa didaur ulang sehingga jalan lainnya untuk menghasilkan uang adalah dengan ditimbang melalui bank sampah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu RT 05 Kompleks Kusta Jongaya yang menjadi pengelola bank sampah di RTnya dan juga merupakan penyandang disabilitas eks kusta, beliau mengatakan bahwa:

“sudah ada beberapa RT disini yang sudah ada bank sampahnya dan salah satunya disini RT 05 kebetulan saya sendiri yang mengelolanya langsung, menurut saya dengan adanya bank sampah ini sangat bermanfaat bagi kami karena sampah-sampah yang dulunya dibuang sekarang bisa kami jadikan uang” (wawancara dengan NA, pada 14 Juli 2017)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pengetahuan pengelolaan sampah sangat memberi dampak yang positif terhadap kehidupan

penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Dengan bantuan program pemerintah memperadakan bank sampah disetiap RT/RW di Kota Makassar juga mampu memberi dampak yang baik bukan hanya untuk Kota Makassar tapi juga kepada masyarakatnya.

c. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diberikan atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain.

Dalam penelitian ini pemerintah Kota Makassar mampu memberikan kekuasaan kepada para penyandang disabilitas fisik Kota Makassar. Kekuasaan yang dimaksud adalah penyandang disabilitas fisik diberikan ruang untuk mampu lebih luas dalam mengembangkan kemampuan yang mereka miliki utamanya dalam hal pengelolaan sampah. Selain itu juga dengan pemberian fasilitas bagi penyandang disabilitas guna untuk membantu mereka dalam pengembangan keterampilan yang dimiliki. Dimana hasil keterampilan tersebut dapat mereka dapatkan sendiri hasilnya. Fasilitas yang diberikan antara lain mesin jahit, mesin obras, pres kancing, dan kain. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas, sebagai berikut:

“mengenai kewenangan pemerintah telah memberikan kami ruang untuk lebih meningkatkan kemampuan kami dalam hal kreativitas yang dimana mampu membantu kami untuk lebih mandiri dan menghasilkan uang sendiri dari berbagai keterampilan yang kami

buat dengan bantuan fasilitas yang diberikan dari Pemerintah Kota Makassar”. (wawancara dengan NA, pada 14 Juli 2017).

Wawancara di atas dapat membuktikan bahwa pemerintah Kota Makassar berusaha untuk membuat kehidupan masyarakat penyandang disabilitas untuk lebih berdaya dengan memberikan mereka wewenang dan fasilitas dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki agar mampu lebih mandiri dan lebih mensejahterakan kehidupan mereka. Dengan fasilitas tersebut penyandang disabilitas dapat memanfaatkannya dengan baik agar keterampilan mereka dapat lebih terasah, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang dapat membantu perekonomian mereka.

Selain itu pemerintah juga telah memberikan kewenangan kepada penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan Bank Sampah. Dimana Bank Sampah itu sendiri telah menjadi program pemerintah Kota Makassar untuk diperadakan di setiap RT/RW di Kota Makassar dan salah satunya ada di kompleks kusta yang berada di Kelurahan Jongaya yaitu pada RT 05 yang di mana pengelolanya langsung adalah eks penderita kusta. Kemudian adapun nasabah dari Bank Sampah itu sendiri adalah masyarakat yang berada di lingkungan kompleks kusta tersebut yang terdiri dari penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu penanggungjawab dari Bank Sampah Pusat Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“sudah menjadi program dari pemerintah untuk memperadakan Bank Sampah di setiap RT/RW yang ada di Kota Makassar dan salah satunya adalah kompleks kusta jongaya yang berada di RT 05.

Kemudian untuk pengelolanya kami tidak membeda-bedakan antara penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Bahkan kami akan sangat senang ketika mereka mampu turut andil dalam pengelolaan Bank Sampah yang ada di Kota Makassar...” (wawancara dengan Bapak R, pada 3 Juni 2017)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah juga memberi ruang kepada penyandang disabilitas dengan melibatkan mereka langsung dalam mengelolah bank sampah yang ada di kompleks mereka. Dengan pelibatan penyandang disabilitas tersebut dapat memberi manfaat kepada mereka untuk bisa berbaur dengan masyarakat dengan lebih baik. Wawancara di atas juga didukung dengan hasil wawancara dari Ibu RT 05 kompleks kusta Jongaya Kota Makassar, sebagai berikut:

“kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya Bank Sampah tersebut kami bisa mendapatkan penghasilan dari sampah dan juga dapat lebih menjaga kebersihan lingkungan karena ketika banyak sampah maka kami kumpulkan kemudian kami pilah-pilah mana yang masih bisa diolah dan ada juga yang langsung kami timbang...” (wawancara dengan NA, pada 3 Juni 2017)

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa pemberian pengetahuan tentang pengelolaan sampah serta pelibatannya kepada penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar mampu memberikan dampak positif kepada kalangan mereka yang minoritas dalam masyarakat, sehingga mampu lebih percaya diri dan memanfaatkan kemampuannya untuk lebih hidup mandiri dan lebih proaktif dalam masyarakat. Salah satu nasabah dari Bank Sampah yang ada di RT 05 juga mengatakan bahwa:

“semenjak ada bank sampah di kompleks ini saya menjadi lebih rajin untuk membersihkan atau mengambil sampah yang ada seperti tempat bekas teh gelas atau botol karena bisa ditimbang di bank

sampah dan bisa menghasilkan uang”(wawancara dengan T, pada 14 Juli 2017)

Dari tanggapan wawancara salah satu nasabah dari bank sampah di RT 05 kompleks kusta jongaya yang juga merupakan penyandang disabilitas memperjelas bahwa dengan adanya Bank Sampah dan mereka turut dilibatkan sangat membawa manfaat bagi mereka karena bisa sedikit membantu perekonomian bagi penyandang disabilitas. Disamping itu program pemerintah mengenai Makassar? Tidak Rantasa bisa berjalan dengan baik dengan bantuan masyarakat yang mengikuti program Bank Sampah itu sendiri.

Namun masyarakat penyandang disabilitas masih membutuhkan perhatian dari pemerintah Kota Makassar mengenai hasil keterampilan yang telah mereka hasilkan. Dimana hasil keterampilan tersebut masih kurang dipasarkan oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Makassar. Pemerintah masih belum maksimal dalam memberikan kewenangan kepada penyandang disabilitas dalam hal pemasarannya dari hasil kreativitas yang telah dibuat oleh penyandang disabilitas karena hanya difasilitasi melalui pameran-pameran tertentu tanpa ada alternative lain untuk melakukan pemasaran tersebut agar dapat menghasilkan lebih.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas Kota Makassar:

“jadi kami masih sangat terbatas karena pemasarannya hanya ketika ada pameran-pameran tertentu di Kota Makassar, meskipun kami juga dibiarkan untuk menjual secara individu namun kami juga masih membutuhkan alternatif lain dari pemerintah untuk memasarkan hasil kretaiivitas yang telah kami buat agar lebih banyak

yang bisa dihasilkan dari keterampilan kami”. (wawancara dengan NI, pada 14 Juli 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih membutuhkan sambungan tangan dari pemerintah dalam hal pemasaran hasil kreativitas mereka. Karena mereka berharap dengan hasil keterampilan yang telah mereka buat tersebut mampu lebih meningkatkan penghasilan para penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar.

Kemudian hasil wawancara lain mengatakan:

“semangat kami juga menjadi sedikit turun karena pemasaran yang kurang luas yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat kurang mengetahui dan meminati, seandainya pemasaran itu lebih bagus dan lebih luas pasti kami juga akan lebih semangat dan berusaha untuk terus membuat kreatifitas dengan hasil yang lebih bagus”. (wawancara dengan T, pada 14 Juli 2017)

Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa penyandang disabilitas berharap kepada pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Makassar agar lebih memperhatikan dan menindaklanjuti keterampilan yang telah mereka buat untuk dipasarkan secara lebih meluas. Pemerintah semestinya mencari alternative lain untuk pemasaran produk dari olahan sampah hasil karya penyandang disabilitas. Seperti misalnya menjalin mitra kerjasama dengan perusahaan atau supermarket yang ada di Kota Makassar atau bahkan diluar Kota Makassar. Karena dengan begitu bisa menjadi salah satu cara juga untuk membuat penyandang disabilitas di Kota Makassar menjadi lebih diberdayakan.

Pemberdayaan yang dilakukan ini sebenarnya memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta

memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

d. Koordinasi

Suatu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baik secara personal maupun kelompok, maka diperlukan adanya koordinasi antar lembaga bersangkutan. Koordinasi oleh (Hasibuan, 2006) dimaksudkan sebagai kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Kedudukan koordinasi dalam proses pemberdayaan masyarakat diharapkan agar proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu organisasi atau kelompok agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pada proses pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar terhadap pengelolaan sampah di Kota

Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar hanya melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar. Adapun bentuk koordinasi yang dilakukan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan bertindak sebagai instruktur atau pemateri pada sosialisasi pengelolaan sampah di Kota Makassar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Makassar, mengatakan bahwa :

“Kalau secara khusus, kami tidak melakukan koordinasi kerja dengan instansi lain dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Tapi, dalam hal ini Dinas Sosial hanya melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Bentuk Koordinasi kami yaitu, Dinas Sosial sebagai penyelenggara pemberdayaan sedang Dinas Pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari tim instruktur dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah di Kota Makassar khususnya terhadap komunitas penyandang disabilitas”. (wawancara dengan HA, pada tanggal 25 Juli, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dinas Sosial terlihat lemah dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain, yaitu koordinasi dilakukan hanya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat saja. Sedangkan, pemberbincangan masalah Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar, banyak instansi yang perlu diajak kerjasama dalam kegiatan koordinasi.

Selanjutnya mengenai bagian dari koordinasi yaitu adanya komunikasi, kerjasama, dan tanggungjawab, Dinas Sosial Kota Makassar masih kurang dalam melakukan hal tersebut karena dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Makassar masih sering melakukannya secara individu.

a) Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam melakukan suatu hubungan seperti koordinasi. Dengan adanya komunikasi maka dapat menyatukan suatu persepsi satu sama lain demi kelancaran pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas fisik Kota Makassar. Dalam melakukan pemberdayaan tersebut Dinas Sosial Kota Makassar masih kurang melakukannya, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu penanggungjawab pemberdayaan tersebut, yang mengatakan bahwa:

“komunikasi memang sangat penting dalam melakukan segala hal, tapi untuk koordinasi yang kami lakukan memang masih kurang tapi komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial dengan pihak/instansi lain yang bersangkutan dengan proses pemberdayaan tersebut tetap ada dan berjalan dengan baik, adapun bentuk komunikasi yang kami lakukan biasanya melalui via telephone atau dengan mendatangi langsung pihak terkait dan melakukan rapat kecil-kecilan.” (wawancara dengan HA, 25 Juli 2017)

Wawancara di atas membuktikan bahwa memang Dinas Sosial Kota Makassar masih kurang melakukan koordinasi. Namun untuk bagian dari komunikasi pemerintah berusaha melakukannya agar lebih efektif dengan tujuan agar pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Wawancara di atas juga didukung dengan wawancara lain yang dilakukan dengan salah satu penyandang disabilitas fisik Kota Makassar, yang mengatakan bahwa:

“salah satu contoh komunikasi yang dilakukan yaitu sewaktu kami akan melakukan pelatihan keterampilan, jadi sebelum pelatihan tersebut berjalan dengan baik sebelumnya ada komunikasi yang dilakukan seperti kami ditelepon oleh pihak Dinas Sosial yang memberi kabar bahwa akan hadir di kompleks kemudian kami berkumpul dan mengadakan rapat untuk

persiapan pelatihan tersebut” (wawancara dengan T, pada 14 Juli 2017)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar telah melakukan komunikasi yang baik dengan pihak penyandang disabilitas, namun masih perlu melakukan komunikasi yang lebih intens dengan berbagai pihak terkait agar dalam melakukan pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan yaitu membuat penyandang disabilitas fisik menjadi lebih berdaya.

- b) Kerjasama adalah syarat mutlak dalam melakukan koordinasi. Kerjasama juga dapat menjadi penentu berhasil tidaknya tujuan dari koordinasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Dalam hal pemberdayaan penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Makassar masih kurang dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Kebersihan, UPTD Pengelolaan Sampah dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar hanya melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Makassar, mengatakan bahwa :

“dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar kami masih melakukannya sendiri atau turun langsung menangani hal tersebut karena menurut kami pihak/instansi lain juga memiliki tugas tersendiri untuk melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. Tapi kami pernah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan yang dimana mereka dipanggil sebagai

instruktur/pemateri dalam pelatihan tersebut” (wawancara dengan HA, 25 Juli 2017).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar masih sangat kurang dalam melakukan kerjasama dengan pihak/instansi lain dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Makassar. Padahal dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang disabilitas utamanya dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar ada begitu banyak pihak yang dapat diajak untuk melakukan suatu hubungan koordinasi. Karena ketika pemerintah saling melakukan koordinasi dengan baik antar sesamanya dengan tujuan untuk membuat penyandang disabilitas lebih berdaya, maka hal tersebut dapat dengan mudah terwujud ketika dilakukan secara bersama-sama.

Selain Dinas Sosial Kota Makassar, instansi lain yang terkait ada Badan Lingkungan Hidup Daerah yang turut berperan dalam hal kebersihan yang ada di Kota Makassar. Badan Lingkungan Hidup Daerah juga masih perlu meningkatkan kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain. Karena instansi tersebut hanya melakukan kerjasama dengan Kecamatan yang ada di Kota Makassar. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu staff Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, yang mengatakan:

“masalah kebersihan itu ditugaskan langsung pada kecamatan atau menjadi tanggungjawab dari masing-masing kecamatan yang ada di Kota Makassar, kalau dari pusat hanya menjadi tim

penilai dari kebersihan itu sendiri” (wawancara dengan Bapak S, pada tanggal 22 Agustus 2017).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa memang Badan Lingkungan Hidup Daerah juga masih kurang dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, jangankan dalam masalah memberdayakan penyandang disabilitas bahkan masalah kebersihanpun yang menjadi tanggungjawab utamanya hanya melakukan kerjasama dengan Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kota Makassar.

- c) Tanggungjawab merupakan hal yang paling penting dalam melakukan sebuah pekerjaan. Karena dengan adanya tanggungjawab maka setiap individu mampu menunjukkan kesadaran mereka untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi kewajibannya. Dinas Sosial Kota Makassar sendiri memiliki tanggungjawab dalam melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas fisik Kota Makassar. Tanggungjawab tersebut dapat menjadi beban ketika tidak dilaksanakan dengan baik. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Makassar, mengatakan:

“Dinas Sosial Kota Makassar berusaha untuk memenuhi tanggungjawab yang telah diterima untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Makassar. Kami sangat menyadari bahwa itu telah menjadi beban kami, oleh sebab itu kami berusaha melakukan yang terbaik untuk memberdayakan penyandang disabilitas” (wawancara dengan HA, 25 Juli 2017)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar berusaha memenuhi dan menjalankan

tanggungjawab mereka untuk membuat kehidupan penyandang disabilitas menjadi lebih berdaya. Karena tanggungjawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang dimana jika terjadi sesuatu maka bisa saja dituntut atau dipersalahkan atas pembebanan yang diterimanya. Wawancara lain yang dilakukan dengan Penata dan Pemilah Sampah Bank Sampah Kota Makassar, yang mengatakan bahwa:

“tanggungjawab itu adalah sebuah amanah yang diberikan kepada kami. Jadi kita sama-sama bertanggungjawab dalam melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di Kota Makassar, tanggungjawab itu kami lakukan dengan cara melibatkan para penyandang disabilitas dalam pengelolaan bank sampah di Kota Makassar dan melakukan evaluasi dari yang telah kami kerjakan supaya para penyandang disabilitas betul-betul bisa berdaya” (wawancara dengan R, pada 25 Juli 2017)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa UPTD Pengelolaan Sampah atau Bank Sampah Kota Makassar berusaha untuk memenuhi tanggungjawab yang telah mereka terima dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Namun dalam melakukan pemberdayaan tersebut masih perlu untuk menambah rekan dalam melakukan pemberdayaan atau dalam hal ini melakukan koordinasi dengan pihak/instansi lain agar pemberdayaan tersebut dapat tercapai secara maksimal dan sesuai dengan tujuan bersama.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar

a. Faktor Pendukung Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik

1. Kebijakan tentang hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menjadi salah satu faktor pendukung diberlakukannya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas fisik Kota Makassar. Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia sebagai berikut:

“ketika kita berbicara mengenai kebijakan maka memang benar itu menjadi salah satu faktor pendukung jika kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik sesuai dengan ketentuannya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas” (wawancara dengan MU, 6 Juni 2017)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki harapan besar agar pemerintah mampu merealisasikan kebijakan yang telah dibuat dengan baik. Karena pemerintah memiliki peran penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Wawancara lain dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Makassar yang sependapat dengan ketua HWDI yang mengatakan bahwa:

“kebijakan bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam memberdayakan penyandang disabilitas yang dimana ada perda Kota Makassar tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yaitu perda Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013” (wawancara dengan HA, pada 10 Mei 2017)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pemerintah diharapkan mampu lebih menumbuhkan kepedulian, pengakuan, dan penghargaan terhadap penyandang disabilitas dengan tujuan memberdayakan kaum mereka dan membuat penyandang disabilitas hidup dengan lebih layak dan berkualitas.

2. Bantuan Peralatan Keterampilan

Pemberian bantuan peralatan keterampilan tentunya bisa menjadi salah satu faktor pendukung untuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Karena dengan adanya bantuan peralatan keterampilan tersebut dapat memudahkan penyandang disabilitas untuk lebih mengembangkan keterampilan yang mereka miliki, sehingga mampu lebih kreatif dan semangat untuk meningkatkan usaha yang mereka jalankan yang berkaitan dengan keterampilan tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“salah satu bantuan yang Dinas Sosial berikan kepada penyandang disabilitas Kota Makassar yaitu berupa bantuan peralatan keterampilan yang dimana bisa membantu mereka mengembangkan keterampilannya. Salah satu peralatan yang diberikan adalah mesin jahit” (wawancara dengan HA, pada 10 Mei 2017)

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwa dengan pemberian fasilitas tersebut diharapkan penyandang disabilitas mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian wawancara lainnya dengan salah satu penyandang disabilitas yang juga termasuk salah satu pengguna peralatan tersebut yang mengatakan bahwa:

“benar pemerintah telah memberikan kami bantuan berupa peralatan seperti mesin jahit dan mesin obras, jadi kami bisa menggunakannya untuk membuat atau menjahit sesuatu yang bisa menambah-nambah penghasilan kami seperti keset kaki” (wawancara dengan NI, pada 14 Juli 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemberian bantuan peralatan dapat mendukung serta mengembangkan keterampilan penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar. Pemerintah mampu menunjukkan perhatian terhadap kehidupan masyarakat penyandang disabilitas. Dengan bantuan peralatan keterampilan tersebut penyandang disabilitas mampu membangun dan mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga mampu untuk lebih berdaya. Serta mereka mampu untuk hidup lebih layak dan bergaul secara normal dalam lingkungan masyarakat.

Tabel 4.3 Bantuan Fasilitas Praktek Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2015

No	Nama Barang	Volume	Satuan
Jenis Kegiatan : Praktek Pembuatan Keset Kaki			
1	Mesin Jahit	5	Buah
2	Kain Kaos	45	Meter
3	Jarum Tangan	15	Buah
4	Benang	15	Lusin
5	Gunting Besar	5	Buah
6	Mesin Obras	3	Buah
Jenis Kegiatan : Praktek Keterampilan Pembuatan Bros			
1	Mesin Jahit	2	Buah
2	Jarum tangan	5	Lusin
3	Benang	11	Lusin
4	Gunting Besar	3	Buah
5	Mesin Obras	2	Buah
6	Pres kancing	6	Buah
7	Tembak Lem Lilin	5	Buah
8	Manik Mutiara	30	Bungkus
9	Kain Planel	30	Meter

10	Kain Tile	30	Meter
11	Piring Bros	20	Bungkus
12	Kain Sutra	10	Meter
13	Pentul	10	Bungkus
14	Pita	15	Gulung
15	Cetakan kancing bungkus	10	Bungkus
16	Jepitan rambut	1	Pak
17	Lem lilin	2	Pak
Jenis Kegiatan : Praktek keterampilan pembuatan lampu hias			
1	Lampu	80	Buah
2	Kabel	170	Meter
3	Fiting	80	Buah
4	Steker	80	Buah
5	Tembak lem lilin	20	Buah
6	Lem lilin	20	Pak
7	Kertas kado	5	Pak
8	Lem plastic	9	Buah
9	Lem kertas	10	Buah
10	Tang	10	Buah
11	Obeng	20	Buah
12	Pilox	20	Botol
13	Cater	20	Buah
14	Gunting	40	Buah

Data Sekunder, Dinas Sosial Kota Makassar, 2016

b. Faktor Penghambat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik

1. Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

Diskriminasi masyarakat yang dilakukan terhadap para penyandang disabilitas merupakan masalah nyata yang dihadapi penyandang disabilitas. Diskriminasi kaum penyandang disabilitas menempatkan mereka dalam strata sosial yang sangat rendah. Bahkan tidak diberi atau tidak memiliki peran yang berarti dilingkungan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang mengatakan bahwa :

“sejauh ini masyarakat pada umumnya masih menganggap penyandang disabilitas sebagai suatu masalah dan dianggap

sebagai sesuatu yang aneh kerana berbeda dengan orang normal lainnya yang disebabkan oleh keterbatasan yang mereka miliki. Dianggap aneh karena penyandang disabilitas memiliki tubuh yang berbeda dari yang lain...”(wawancara dengan MU, 6 Juni 2017)

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap kaum mereka. Padahal secara hukum diskriminasi bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Akibat lebih lanjut dari diskriminasi ini penyandang disabilitas menjadi berkurang kesempatannya untuk memperoleh hak pemberdayaan. Mereka selalu merasa diperlakukan dengan tidak adil ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang mereka mendapatkan hinaan dari orang lain yang mempunyai kehidupan yang normal tanpa memperdulikan bagaimana kerasnya kehidupan penyandang disabilitas. Lanjut, komentar dari Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia mengenai diskriminasi yang sering dirasakan oleh komunitas mereka, beliau mengatakan:

“diskriminasi yang masih dirasakan penyandang disabilitas eks kusta misalnya mereka menjual makanan maka masyarakat akan merasa makanan tersebut kotor dan takut untuk mengkonsumsinya, sampai sekarang hal itu masih dirasakan penyandang disabilitas eks kusta”(Wawancara dengan MU, pada 6 Juni 2017)

Pemerintah harus memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat mengenai penyakit penyandang disabilitas agar mereka mampu menerima keberadaan penyandang disabilitas seperti eks kusta dan menghilangkan diskriminasi yang selalu mereka dapatkan. Pemberdayaan penyandang disabilitas pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pihak swasta, masyarakat,

keluarga termasuk orang tua dan penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu, semua unsur tersebut berperan aktif dalam mewujudkannya. Dengan memberikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas akan terjamin dan terlindungi. Sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Proses pemberdayaan penyandang disabilitas eks kusta dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari ketiga indikator strategi pemberdayaan penyandang disabilitas yang berjalan dengan cukup baik, meskipun pada pelaksanaannya ada beberapa kendala yang menunjukkan bahwa hanya sebagian penyandang disabilitas fisik mampu mengembangkan kembali hasil keterampilan mereka. Sehingga dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas tidak hanya sampai pada pemberian keterampilan saja tetapi pemerintah dalam hal ini perlu turut mengambil peran penting dalam pemasaran karya penyandang disabilitas. Bukan hanya pemasaran saja yang harus diperhatikan tetapi pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas sehingga nantinya mereka mampu berdaya dan mencapai kemandirian.

2. Anggaran

Anggaran yang disediakan pemerintah bagi penyandang disabilitas masih dirasakan sangat kurang untuk kepentingan mereka. Karena

dengan anggaran tersebut setiap rencana kegiatan pemberdayaan akan mudah terlaksana dan mampu membantu kelayakan hidup bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas Sosial Kota Makassar.

“terbatasnya jumlah anggaran yang diberikan kepada penyandang disabilitas fisik menjadi salah satu penghambat jalannya pemberdayaan, biasanya kegiatan pemberdayaan sudah direncanakan tapi rencana kegiatan pemberdayaan tersebut harus disesuaikan dengan kas bagian keuangan karena keterbatasan anggarannya” (wawancara dengan HA, 10 Mei 2017)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam hal anggaran pemerintah masih mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memperhitungkan kembali anggaran yang diberikan guna untuk memberdayakan penyandang disabilitas eks kusta. Padahal diketahui bersama bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan peran penting dalam memberikan dana untuk memberdayakan penyandang disabilitas fisik tersebut. Kurangnya anggaran dari pemerintah akan mempersulit untuk menjalankan proses pemberdayaan penyandang disabilitas fisik.

3. Pemasaran

Akses pemasaran ataupun promosi dari hasil kreativitas atau keterampilan yang telah dibuat oleh penyandang disabilitas eks kusta sangat kurang. Sehingga masalah pemasaran ini membuat semangat mereka untuk berusaha menjadi menurun. Penyandang disabilitas fisik setelah diberikan keterampilan mereka dilepas begitu saja tanpa diberikan arahan ataupun memfasilitasi pemasaran dari hasil kreativitas

para penyandang disabilitas fisik tersebut. Hal ini masih menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan fasilitas pemasaran hasil kreativitas penyandang disabilitas fisik.

“faktor yang paling menghambat pemasaran atau promosi, akses pemasaran atau promosi hasil karya penyandang disabilitas itu masih sangat kurang sehingga kadang-kadang membuat penyandang disabilitas yang sebetulnya ingin sekali berusaha tapi akhirnya membuat mereka tidak semangat untuk melakukan usaha tersebut”(wawancara dengan MU , pada 6 Juni 2017)

Hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah masih kurang dalam menindaklanjuti kreativitas yang telah dihasilkan oleh penyandang disabilitas, pemerintah tidak begitu luas dalam melakukan promosi. Padahal salah satu yang akan membuat kehidupan penyandang disabilitas lebih berdaya adalah dengan bantuan pemerintah untuk membantu menjual atau mempromosikan hasil kreativitas mereka sehingga perekonomiannya bisa lebih baik. Karena mereka menyadari bahwa masyarakat akan kurang meminati hasil kreativitas yang mereka buat dengan alasan penyakit yang mereka derita. Wawancara lainnya dengan salah satu penyandang disabilitas tentang faktor penghambat pemberdayaan, mengatakan :

“pemasaran dari hasil keterampilan pengelolaan sampah mendapat kendala dari kurangnya minat beli masyarakat dan rendahnya penawaran masyarakat terhadap hasil kreativitas yang kami buat”(Wawancara dengan NA, pada 1 Juni 2017)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwas sulitnya akses pemasaran hasil keterampilan penyandang disabilitas akan membuat semangat berusaha penyandang disabilitas menurun. Jika hal ini terjadi

maka dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas akan sulit mencapai kemandirian penyandang disabilitas.

Hal ini menunjukkan bahwa perhatian penyandang disabilitas fisik tidak hanya pada pemberian dana berupa alat-alat usaha dan pelatihan-pelatihan saja. Tetapi yang lebih penting juga adalah monitoring dan kesinambungan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Kota Makassar. Karena ketika pemerintah sedikit lebih memberikan perhatian mereka kepada penyandang disabilitas dalam hal ini pemerintah memberikan fasilitas untuk pemasaran hasil kreativitas para penyandang disabilitas agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Sehingga semangat merekapun untuk melanjutkan usaha mereka akan lebih membara karena dampak yang mereka rasakanpun sangat baik ketika pemasarannya lebih baik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai strategi pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu:

1. Strategi pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar menunjukkan tiga indikator yaitu : 1) Keterampilan yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas penyandang disabilitas fisik yang dilakukan dengan cara (a) pemberian pelatihan/pembinaan keterampilan dan (b) melakukan penerapan keterampilan. 2) Pengetahuan dengan melihat keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas maka pengetahuan tentang pengelolaan sampah akan sangat berguna untuk lebih membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih mandiri dan proaktif dalam masyarakat. 3) Kekuasaan dengan memberikan wewenang kepada para penyandang disabilitas dalam melakukan segala sesuatu yang dapat membantu dan membuat mereka hidup menjadi lebih baik dan lebih layak dalam lingkungan masyarakat. 4) Koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar hanya dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar. Dari keempat indikator ini, tiga indikator berjalan dengan baik namun belum cukup untuk membuat penyandang disabilitas lebih berdaya, karena hanya sebagian dari mereka yang mampu untuk mengubah pola pikirnya.

Ditemukan bahwa pemberian pelatihan keterampilan masih belum cukup mendorong penyandang disabilitas kearah yang berdaya, karena hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang mampu untuk hidup lebih mandiri dan mengembangkan hasil dari pelatihan keterampilan tersebut. Selanjutnya untuk indikator terakhir juga ditemukan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar perlu untuk meningkatkan koordinasinya dengan berbagai pihak yang juga memiliki peran dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam pengelolaan sampah, seperti Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah, dan masih banyak pihak lain.

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dalam pengelolaan sampah Di Kota Makassar diantaranya faktor pendukung yaitu Kegiatan pemberdayaan Oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan bantuan peralatan keterampilan. Sedangkan faktor penghambat yaitu anggaran yang masih kurang dan pemasaran atau promosi dari hasil keterampilan penyandang disabilitas yang masih kurang serta diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan lagi kondisi penyandang disabilitas fisik :

1. Pemerintah ataupun instansi yang terkait dengan penanganan penyandang disabilitas, sebaiknya setiap tahun melakukan survey data peningkatan dan penurunan jumlah penyandang disabilitas di Kota Makassar.
2. Pemerintah selain memberikan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dalam bentuk pelatihan keterampilan, sebaiknya juga memfasilitasi hasil keterampilan penyandang disabilitas tersebut dalam memasarkan atau mempromosikannya kemasyarakat umum.
3. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan hal mengenai anggaran yang harusnya lebih baik lagi, agar setiap pelaksanaan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas fisik berjalan dengan lebih baik baik.
4. Pemerintah harus lebih serius dalam mengimplementasikan program atau segala kebijakan yang telah dibuat dengan tujuan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik di Kota Makassar.
5. Perlunya kerjasama pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat yang mampu untuk mendukung proses pemberdayaan penyandang disabilitas fisik sehingga penyandang disabilitas fisik mampu untuk berdaya dan hidup mandiri.

6. Pemerintah perlu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara umum mengenai jenis penyakit penyandang disabilitas agar masyarakat mengetahui bahwa penyandang disabilitas tidak semestinya untuk dijauhi melainkan untuk diberdayakan dan diterima secara normal di lingkungan masyarakat dimanapun mereka berada.
7. Semua pihak yang terkait baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat sebaiknya memperlakukan para penyandang disabilitas secara merata dengan manusia yang normal, sehingga tidak ada lagi yang namanya diskriminasi yang mereka rasakan.
8. Dalam upaya pemenuhan hak-hak aksesibilitas, pemerintah perlu menyediakan akses umum yang dapat mempermudah penyandang disabilitas fisik untuk berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari seperti : bangunan umum, transportasi, dan layanan publik lainnya yang tentunya aman dan nyaman bagi keselamatan penyandang disabilitas.

Daftar pustaka

- Apriyani. 2011. *Aksesibilitas penyandang disabilitas pengguna alat bantu gerak pada bangunan institusi pendidikan*. Universitas Indonesia
- Asmah. 2013. *Koordinasi Sub Bagian Tata Usaha Dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Dalam Pencairan Dana Kegiatan Keagamaan Di Sekretariat Kabupaten Takalar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Buku Profil Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2015
- Harahap, Bustanuddin. 2015. *Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*. *Jurnal Inovatif*, Vol VIII No 1
- Idjoel. 2017. *Pengertian strategi*. <https://www.idjoel.com/pengertian-strategi-menurut-para-ahli/>. Diakses 9 Februari 2017.
- Madani, Muhlis, dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Makassar: Fisipol Unismuh Makassar.
- Mandiri, Bisa. 2015. *Macam-Macam Disabilitas atau gangguan Fungsi*. Pada 16 Januari 2015. (<https://bisamandiri.com/blog/2015/01/macam-macam-disabilitas-atau-gangguan-fungsi/>) di akses pada 21 Oktober 2016
- Mardikanto, Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2013 . *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Puspasari, Dyota, 2012. *Makna Hidup Penyandang Cacat Fisik Postnatal Karena Kecelakaan*. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 1 No. 02.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Prasetyo, 2015. *Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat*. Kebumen pada 7 Mei 2015(<https://prASFapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>) diakses pada 19 Oktober 2016
- Rahmayani, Sri. 2015. *Strategi Empiris Rasional Pemberdayaan Perempuan Eks Penderita Kusta Melalui Program Kewirausahaan Sosial Oleh Komunitas Nalacity Di Kampung Sitanala Tangerang*. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Sipahelut, Michael. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan FKIP Unmul Samarinda. Kutai Timur.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukmaniar, 2007. *Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Suparjo, Apar. 2017. *Penyakit Kusta Menular atau Tidak*. Jawa Barat pada 29 Mei 2017. (www.pusatgreenworld.web.id) diakses pada 17 Agustus 2017.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Usman, Sunyoto. 2015. *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijayanto, Hendra, 2015. *Pemberdayaan Difabel Dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 1 No. 2.
- Wulandari, Ade. 2016. *Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah*. Institut Pertanian Bogor.

L

A

M

P

I

R

A

N



Nama Penyandang Disabilitas Peserta Keterampilan Pembuatan Keset Kaki

Kelompok I

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Hj. Rahmatiah	Ketua
2	Salma	Anggota
3	Dg. Nani	Anggota
4	Asminar	Anggota
5	Sunarti	Anggota
6	Hatipah	Anggota
7	Ramlah	Anggota
8	Nurlia	Anggota
9	Yena	Anggota
10	Suprihatin	Anggota
11	Saodah	Anggota
12	Fatmawati	Anggota
13	Nurintang	Anggota
14	Nurfadilah	Anggota
15	Mina	Anggota
16	Jumariah	Anggota
17	Rini	Anggota
18	nani	Anggota

Nama Penyandang Disabilitas Peserta Keterampilan Pembuatan Keset Kaki

Kelompok II

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Aminah	Ketua
2	Nuraini	Anggota
3	Murni	Anggota
4	Nurmala	Anggota
5	Dg. Intang	Anggota
6	Nurbaya	Anggota
7	Marhumi	Anggota
8	P. Karra	Anggota
9	Ruhani	Anggota
10	Rahma	Anggota
11	Rini	Anggota
12	Rusni	Anggota
13	Mantasia	Anggota
14	Finarti	Anggota
15	Sumiati	Anggota
16	Nurwahyuni	Anggota
17	Halija	Anggota
18	Juliati	Anggota
19	Nurhaedah	Anggota
20	Tolawati	Anggota

Nama Penyandang Disabilitas Peserta Keterampilan Pembuatan Bros

Kelompok III

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Rahmawati	Ketua
2	Sarinah	Anggota
3	Farida	Anggota
4	Desi Ekasari	Anggota
5	Irmayanti	Anggota
6	Wisma Anggraeni	Anggota
7	Asriani	Anggota
8	Irma	Anggota
9	Kasimah	Anggota
10	Amsaul Husna	Anggota
11	Muriati	Anggota
12	Fitri Rahayu	Anggota
13	Misbahi	Anggota
14	Rosdiana	Anggota
15	Rajawali	Anggota
16	Mariati	Anggota
17	Rosida	Anggota
18	Rosmini	Anggota
19	Ayu	Anggota
20	Ramina	Anggota

Nama Penyandang Disabilitas Peserta Keterampilan Pembuatan Keset Kaki

Kelompok IV

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Nuraeni	Ketua
2	Rostiah	Anggota
3	Mariani	Anggota
4	Martina	Anggota
5	Citra Ramli	Anggota
6	Sari Embung	Anggota
7	Sartika	Anggota
8	Rusnaeni	Anggota
9	Fitriah	Anggota
10	Riska	Anggota
11	Mariana	Anggota
12	St. Asmawati	Anggota
13	Dg. Bimbi	Anggota
14	Rusneti	Anggota
15	Damayanti	Anggota
16	Murlina	Anggota
17	Sari Alam	Anggota
18	Martini	Anggota
19	Adzana Yulianti	Anggota
20	Marina	Anggota

Nama Penyandang Disabilitas Peserta Keterampilan Pembuatan Lampu Hias
(Lampion)

Kelompok V

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Rahimi	Ketua
2	Muh Yusuf	Anggota
3	Sofyan	Anggota
4	Mandito	Anggota
5	Andi Muh. Darul Aqsa	Anggota
6	N. Fadli	Anggota
7	Usman	Anggota
8	Hariyoko	Anggota
9	Ramdayani	Anggota
10	Rahmat	Anggota
11	Nursam	Anggota
12	Muh Resyal Putra Aditama	Anggota
13	Muh Alif Indrawan	Anggota
14	Muh Alim	Anggota
15	Syahrul Ramadhan	Anggota
16	M. Amin	Anggota
17	Bayu Asma Subrata	Anggota
18	Mustakim	Anggota
19	Ruman	Anggota
20	Muh. Ramadhan	Anggota

Riwayat Hidup



Skripsi ini ditulis oleh seorang putri bugis dari Kabupaten Maros, Kecamatan Bantimurung. Indah Yuliyanti, lahir di Maros pada tanggal 09 April 1995, anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan H.Rowa dan Hj. Murni.

Penulis mengawali jenjang pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri Pakalu 1, lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bantimurung, lulus tahun 2010. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Bantimurung dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 juga penulis diterima di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama di perguruan tinggi, penulis pernah tergabung dalam organisasi Ortom Muhammadiyah, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 pernah terpilih sebagai Mahasiswa berprestasi Prodi Ilmu Administrasi Negara dan 2016 terpilih sebagai Duta Administrasi Publik.

Penulis memegang motto, ketika seorang wanita memiliki kecerdasan maka dia akan melahirkan dua generasi emas yaitu dirinya dan keturunannya kelak. Oleh karena itu semangat penulis terpacu untuk terus melanjutkan pendidikan. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar”.